

ANALISIS KRITIS TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA TERKAIT DENGAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN

Oleh:

Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani

E-mail: Gung_riesa@ihdn.ac.id

Fakultas Dharma Acarya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Abstrak

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut tercantum tidak hanya dalam sila kedua Pancasila namun juga tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keadilan tersebut berlaku untuk semua gender dan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar, telah menetapkan beberapa undang-undang untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi yang cenderung menjadikan perempuan sebagai korban. Undang-undang yang diatur untuk melindungi hak perempuan antara lain Undang-undang tentang HAM, Undang-undang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, kemudian juga terakhir perkembangannya adalah Rancangan UU Anti Kekerasan Seksual dan Rancangan UU Ketahanan Keluarga. Adapun usulan Rancangan UU Ketahanan Keluarga itu telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis secara kritis beberapa pasal yang dirumuskan di dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga. RUU tersebut dinilai terlalu mencampuri urusan pribadi masyarakat yang berhubungan terhadap pembentukan keluarga, pembagian tanggung jawab serta penetapan peran serta fungsi dari masing-masing pasangan. Rancangan Undang-undang ini juga merupakan suatu tantangan terkait dengan perkembangan perlindungan hak perempuan di Indonesia.

Keyword : RUU Ketahanan Keluarga, perempuan, polemik, perlindungan hak perempuan.

PENDAHULUAN

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga Negara Republik Indonesia terutama kelompok rentan, perempuan, anak dan kelompok berkebutuhan khusus penyandang disabilitas. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum yang dibuat pemerintah secara tekstual mengatur sama rata untuk semua gender dan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Padahal faktanya di dalam masyarakat masih berlaku budaya yang sering

menempatkan perempuan lebih rendah posisinya daripada laki-laki. Konsekwensinya perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil maupun kekerasan karena budaya tersebut.

Melihat rentannya kaum perempuan secara fisik dan mental dibandingkan laki-laki pemerintah secara khusus memuat beberapa undang-undang yang merepresentasikan perempuan agar memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi diri mereka. Undang-undang yang diatur untuk melindungi hak perempuan yaitu Undang-undang tentang HAM, Undang-undang Tentang Kekerasan dalam

Rumah Tangga, Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Porno-Aksi. Semakin terdengar gaung kesetaraan gender semakin juga perempuan memiliki banyak kesempatan berada pada posisi yang sama dengan laki-laki, hal tersebut juga sangat didukung oleh pemerintah. Terbukti dengan banyaknya program pemerintah yang melibatkan perempuan salah satunya yaitu 30% kursi partai politik harus diisi oleh perempuan. Kesempatan dalam segala bidang juga diberikan pemerintah kepada para perempuan yang juga sebagai ibu pekerja. Pemerintah memberikan dukungan moral kepada ibu yang bekerja dengan mengizinkan ibu memiliki cuti untuk melahirkan dan juga cuti ayah saat ibu melahirkan. Begitu juga dalam bidang pendidikan saat ini perempuan diinginkan dan diharapkan oleh pemerintah memiliki pendidikan tinggi sehingga meningkatkan sumber daya manusia Negara yang berkualitas. Berbagai program untuk merepresentasikan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki sudah pemerintah rancang dan laksanakan. Belakangan ini pemerintah khususnya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. RUU ini membawa polemik dalam masyarakat Indonesia karena dianggap terlalu mencampuri ranah pribadi masyarakat dalam kaitannya dengan perempuan RUU ini dimaksud untuk melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga ternyata dianggap sebagian besar masyarakat sebagai bentuk merendahkan martabat perempuan.

Aktivis perempuan Tunggal Prawesti menganggap bahwa RUU ketahanan keluarga merupakan upaya untuk menghalangi kemandirian

perempuan. Pasal-pasal yang tercantum dalam RUU Ketahanan Keluarga dianggap membatasi dan mengatur terlalu dalam cara masyarakat dalam membina keutuhan rumah tangga mereka masing-masing terutama point mengenai tugas dan fungsi istri. RUU ini dianggap bertentangan dengan gaung kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang dimaksud disini bukan dalam bentuk diskriminasi laki-laki terhadap perempuan tetapi lebih kepada penekanan kemandirian perempuan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga. Rancangan Undang-undang ini merupakan bentuk penghapusan upaya kesetaraan gender bagi kaum perempuan.

PEMBAHASAN

A. PERAN PEREMPUAN DALAM TEORI HUKUM FEMINISME

Jenis kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu (id.wikipedia.org). Menurut Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan.

Sedangkan gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai feminine, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan maskulin, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip gender).

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap

perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Prasetyo, 2014).

Stereotip gender yang muncul mengantarkan kita pada pemahaman mengenai hukum feminisme. Teori feminisme sendiri merupakan sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan social dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari persepektif yang terpusat pada perempuan (George Ritzer, 2005). Persepektif-perspektif ini tentu saja dimulai dari berbagai lini yang paling disorot mengenai kekerasan dan kemandirian perempuan. Dalam tulisan ini teori feminisme dipandang dalam hal pembentukan kemandirian perempuan itu sendiri.

Dalam teori hukum feminisme suatu wilayah yang telah memberikan kontribusi penting dan orisinal terhadap pemikiran yang kontemporer. Keunikan yang ada dalam teori ini adalah ketegasan dan keterkaitannya tentang teori dan praktiknya antara publik dan privat. Tentang teori dan pengalaman yang mempunyai hubungan yang khusus dalam feminisme yang telah dikemas dalam suatu slogan “*the personal is political*” (Hum, Maggie, 2002).

Adapun tujuan pokok dari teori feminisme sendiri adalah untuk memahami berbagai penindasan perempuan secara ras, gender, kelas dan pilihan seksual dan bagaimana mengubahnya yang terpenting dari teori ini adalah mengungkapkan nilai pribadi perempuan serta pengalaman yang dialaminya bersama dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Teori yang menganalisis perbedaan pengalaman dan perlakuan di dalam masyarakat disebabkan atau didasarkan karena aspek seksual (jenis kelamin) itu terbangun dalam setiap individu dan bagaimana ia dapat memberikan penjelasan tentang pengalaman dari berbagai perbedaan yang ada. Teori feminisme fokus pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang.

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) KETAHANAN KELUARGA

RUU ketahanan keluarga merupakan RUU yang tujuannya menciptakan keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional berdasarkan Naskah Draf RUU Ketahanan keluarga. Rancangan undang-undang ini dibentuk untuk menghadapi krisis keluarga dan membentuk keluarga yang berkualitas. Dimana pengertian krisis keluarga berdasarkan Draf RUU Ketahanan Keluarga merupakan suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak

terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi Keluarga. Sedangkan keluarga yang berkualitas memiliki pengertian kondisi Keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga Pasal 24 Ayat (1) dicantumkan fungsi serta peran masing-masing pasangan suami dan istri.

Pasal tersebut menyatakan bahwa “ Dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. (2) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. (3) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam ketentuan pasal di atas terlihat jelas bagaimana keseimbangan peran antara suami

dan istri, serta hak kewajiban seorang istri selaku perempuan juga dijamin dalam ketentuan pasal ini.

Pasal 25 yang isinya, (1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran; c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan di atas terlihat jelas peran dan fungsi masing-masing suami dan istri yang seyogyanya saling menghormati dan memahami

satu dengan yang lain sehingga keutuhan rumah tangga dapat terjalin.

Pasal 29 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: a. hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya; b. kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; c. fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan d. fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.

Dengan ada ketentuan di atas maka hak-hak mendasar kaum perempuan benar-benar mendapat perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi perempuan yang dikikiskan haknya akibat persoalan kodrati perempuan.

C. KAJIAN RUU KETAHANAN KELUARGA

Setelah membaca dengan teliti ketiga pasal tersebut maka berikut ini adalah analisisnya. Perspektif yang digunakan adalah perspektif kajian hukum feminis

a. RUU Ketahanan Keluarga Pasal 24

Berdasarkan Rancangan Undang-undang Ketahanan berikut 3 pasal yang menimbulkan polemik mengenai pembatasan kemandirian perempuan dalam spectrum gender. Pasal 24 mengenai ketidakjelasan indikator "saling mencintai" antara pasangan suami dan istri yang terikat

dalam perkawinan. Salah satu bentuk saling mencintai jika dikaji dalam teori keluarga salah satunya yaitu keintiman (intimacy).

Menurut Erikson (dalam Valentini, & Nisfiannoor, 2006) intimacy sebagai kemampuan untuk berkomunikasi dan juga berperan penting dalam menjalin dan meningkatkan keintiman dalam menjalin hubungan yang romatis. Hal ini didukung oleh pernyataan Strong dan Devault (1989) yang mengemukakan bahwa intimacy dan komunikasi saling berkaitan dan pasangan yang mengalami kesulitan dalam komunikasi dikatakan tidak memiliki intimacy didalam hubungan mereka.

Menurut Sternberg (2006) intimacy adalah elemen emosional dalam suatu hubungan yang melibatkan pengungkapan diri (self-disclosure), yang akan menghasilkan suatu keterkaitan, kehangatan, dan kepercayaan. Sternberg (2006) juga menyatakan bahwa intimacy adalah kedekatan yang dirasakan oleh dua orang dan kekuatan yang mengikat mereka berdua untuk tetap bersama.

Melihat dari berbagai jenis pengertian para ahli mengenai keintiman sebagai salah satu bentuk saling mencintai ranah ini mengatur terlalu banyak ruang privasi dari pada individu Negara. Sedangkan undang-undang juga menetapkan kebebasan warga Negara untuk mendapatkan Haknya dan menentukan pendapatnya. Rancangan undang-

undang ini menghalangi kebebasan masing-masing individu untuk mengekspresikan perasaan pribadinya.

b. RUU Ketahanan Keluarga Pasal 25

Pasal 25 RUU Ketahanan keluarga membagi peran dan fungsi suami serta istri berdasarkan hal tertentu. Dalam pasal ini suami diwajibkan berperan sebagai kepala keluarga yang memiliki fungsi memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki fungsi mengatur urusan rumah tangga. Dalam pasal ini perempuan di kelompokkan menjadi sosok yang tidak memiliki power dalam rumah tangga. Kesetaraan gender yang sejak dulu dikemukakan oleh para aktivis menjadi hal yang sia-sia jika RUU ini akhirnya disahkan. Perempuan saat ini sangat independen secara intelektual maupun pekerjaan.

RUU Ketahanan Keluarga Pasal 25 terlalu membatasi gerak perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dibidang profesionalisme seperti bidang pekerjaan, social dan politik dalam masyarakat. Peran keluarga masing-masing sebaiknya ditentukan dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan suasana keluarga masing-masing.

Semakin berkembangnya jaman peran laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga juga semakin baik. Bahwasannya

peran dan fungsi masing-masing pasangan tidak harus ditentukan berdasarkan gender. Implementasinya pun telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam bidang pelaksanaan urusan rumah tangga seperti memasak, menyapu, merawat anak hal tersebut tidak hanya perempuan sebagai pelaku utama tetapi para laki-laki ikut membantu peran istri dalam merawat, dan melaksanakan urusan rumah tangga.

Kebersamaan dalam melaksanakan seluruh peran dan fungsi keluarga juga dilakukan oleh para perempuan. Tidak sedikit perempuan yang bekerja untuk membantu meningkat perekonomian keluarga. Banyak perempuan yang bekerja secara aktif dan mengembangkan sumber daya manusiannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup keluarganya. Jika RUU Ketahanan Keluarga ini menetapkan peran dan fungsi perempuan sebagai pengatur urusan rumah tangga tentu hal tersebut membatasi aktifitas profesional mereka dalam upaya membantu suami memperbaiki kualitas ekonomi keluarga.

c. RUU Ketahanan Keluarga Pasal 29

Pasal 29 RUU Ketahanan Keluarga mengenai hak cuti melahirkan selama 6 bulan menimbulkan anggapan bahwa perusahaan atau badan pemerintahan akan enggan merekrut perempuan sebagai tenaga profesional melihat masa cuti yang terlampau lama yang mengakibatkan kurang efisiensi dalam pekerjaan. Hal

tersebut tentunya berdampak pada profesionalisme perempuan dalam bidang pekerjaan yang mereka emban.

Menurut Siagian (dalam Kurniawan, 2005), profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat.

Dalam keseharian profesionalisme dipahami sebagai cara kerja secara profesional, menguasai bidang kerja, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Melihat dari pengertian profesionalisme sendiri dan dipadankan dengan RUU ketahanan keluarga menimbulkan dampak negative terhadap profesionalisme perempuan dilingkungan pekerjaan. Kaum maskulin akan menganggap perempuan tidak memiliki cukup kapabilitas untuk meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja dan dianggap tidak memiliki kecakapan dibanyak aspek pekerjaan. Pemerintah juga selain membatasi hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan tetapi juga menimbulkan kemandirian dalam usaha perlindungan perempuan. Perempuan cukup mampu memanajerisasi dirinya untuk melaksanakan peran sebagai istri dan ibu serta menjaga perannya secara profesional di lingkungan kerja.

PENUTUP

Perempuan sebagai sosok personal terlepas dari jenis kelaminnya ingin diberikan ruang secara bebas untuk mengekspresikan diri. Segala

bentuk dan upaya pihak pemerintah dalam melindungi hak perempuan telah dilakukan secara tertulis dalam undang-undang dasar dikarenakan perempuan merupakan pihak yang lebih rentan menjadi korban dibanding pihak laki-laki. Tetapi aturan yang terlalu melindungi justru akan membatasi serta memanjakan pihak perempuan dalam mendapatkan independensi dirinya secara personal.

Rancangan undang-undang ketahanan keluarga pasal 24, 25 dan 29 memiliki efek membatasi ruang gerak perempuan dalam mendapatkan haknya untuk mandiri dan berdikari secara professional baik dilingkungan keluarga, social masyarakat maupun lingkungan profesionalisme kerja. Rancangan undang-undang ini akan membuat pihak perempuan semakin sulit menggapai tingkat jabatan yang lebih tinggi yang biasa kaum laki-laki peroleh karena dianggap kurang memiliki kapabilitas secara professional serta menghalangi kerja efektif tempat mereka bekerja disebabkan rancangan undang-undang yang menimbulkan stereotip negative dari kaum laki-laki bahwa perempuan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sebaik laki-laki karena perempuan seharusnya lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga melalui pasal-pasal RUU Ketahanan keluarga. Hal ini kedepannya akan berpengaruh tidak hanya kepada perempuan secara personal tetapi juga kepada keluarga dari masing-masing masyarakat yang memiliki pasangan mandiri yang bekerja. Peluang bagi

perempuan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga juga semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

George Ritzer – Douglas J Goodman, 2005, "Teori Sosiologi Modern", Jakarta : Prenada Media, hal 404

Herien Puspitawati, Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan gender, Makalah Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender se Wilayah 1 Bogor Kamis, 22 Maret 2012, hlm. 11-12

Hum, Maggie, Ensiklopedia Feminisme, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Hurlock, E, B. (2006). Psikologi Perkembangan. Edisi ke 5. Erlangga: Jakarta.

<https://today.line.me/id/pc/article/Draf+Lengkap+RUU+Ketahanan+Keluarga-eYqygO> diakses tanggal 5 maret pukul 01.15

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984.

Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 84.

Valentini dan Nisfianoor, (2006). Identity Achievement dengan Intimacy pada Remaja SMA. Jurnal Provita Volume 2; No. 1; Mei 2006